

ETIKA PERGANTIAN KURIKULUM TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG

Slamet Rianto Aji¹, Antonius Kerung², Maria Fransiska F. Radja³, Leonardus Putera Tandil⁴,
Widyatmike Gede Mulawaman⁵, Usfandi Haryaka⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Mulawarman

mmp.slamet@gmail.com¹, antonius.kk.93@gmail.com², mariaradja@gmail.com³,
puteratandileonardo@gmail.com⁴, widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁵,
usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id⁶

Abstract

Curriculum changes that often follow leadership changes often pose new challenges in education financing. This study aims to (1) examine how leadership change followed by curriculum change affects education financing and (2) analyze strategies that can be used to reduce its financial impact. This research uses a descriptive qualitative method with literature studies and policy analysis. The results of the study show that inconsistencies in curriculum policies lead to budget waste and inefficient use of resources. An ethical approach is needed in the curriculum reform process by considering aspects of sustainability, fairness, and financing efficiency. Strategies that can be carried out include data-based planning, digitization of learning, and stakeholder involvement. This article suggests that the government should not make the curriculum a political instrument, but rather a long-term policy based on the needs and context of national education.

Keywords: Policy Ethics, Curriculum, Education Financing, Education Strategy, Leadership Change.

Abstrak

Pergantian kurikulum yang kerap mengikuti pergantian kepemimpinan sering kali menimbulkan tantangan baru dalam pembiayaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) meneliti bagaimana pergantian pimpinan diikuti pergantian kurikulum memengaruhi pembiayaan pendidikan dan (2) menganalisis strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan kebijakan kurikulum menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Diperlukan pendekatan etis dalam proses reformasi kurikulum dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi pembiayaan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain ialah perencanaan berbasis data, digitalisasi pembelajaran, dan pelibatan pemangku kepentingan. Artikel ini menyarankan agar pemerintah tidak menjadikan kurikulum sebagai instrumen politis, melainkan sebagai kebijakan jangka panjang berbasis kebutuhan dan konteks pendidikan nasional.

Kata Kunci: Etika Kebijakan, Kurikulum, Pembiayaan Pendidikan, Strategi Pendidikan, Perubahan Kepemimpinan.

A. PENDAHULUAN

Pergantian kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sistem pendidikan di Indonesia. Seiring perubahan kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah, kerap terjadi pembaruan kebijakan pendidikan, termasuk penggantian kurikulum. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan visi pendidikan baru, tetapi juga muatan politis yang memengaruhi arah dan bentuk sistem pembelajaran di sekolah (Sagala, 2010). Meskipun pembaruan kurikulum dapat dilihat sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan perkembangan global, namun etika dalam pelaksanaannya perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Pergantian kurikulum yang tidak didasarkan pada evaluasi mendalam cenderung berdampak pada pemborosan anggaran negara. Setiap kali terjadi perubahan kurikulum, dibutuhkan biaya besar untuk pengadaan buku, pelatihan guru, revisi perangkat ajar, dan adaptasi infrastruktur penunjang. Dampak ini sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang kerap kali belum selesai mengimplementasikan kurikulum lama ketika kurikulum baru kembali diperkenalkan (Fauzi, 2022). Dengan demikian, muncul pertanyaan etis tentang keadilan dan rasionalitas dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan kurikulum.

Selain aspek etika, terdapat tantangan besar dalam pembiayaan pendidikan yang harus dikelola secara strategis. Perubahan kurikulum secara mendadak dan tidak berkesinambungan dapat mengganggu perencanaan anggaran tahunan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sisi lain, peluang muncul dari kemampuan pemerintah untuk merancang strategi kebijakan pembiayaan yang adaptif dan efisien, seperti melalui digitalisasi bahan ajar, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pelatihan guru berbasis daring (UNESCO, 2021).

Oleh karena itu, penulisan jurnal ini bertujuan untuk: (1) meneliti bagaimana pergantian pimpinan yang diikuti oleh pergantian kurikulum mempengaruhi pembiayaan pendidikan, dan (2) menganalisis strategi yang dapat diambil untuk mengatasi dampak finansial tersebut. Penelitian ini penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan kebijakan pendidikan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomis.

Tujuan Penelitian

1. Meneliti bagaimana pergantian pimpinan diikuti pergantian kurikulum mempengaruhi pembiayaan Pendidikan.
2. Menganalisis strategi yang diambil untuk mengatasi dampak finansial pada sektor pendidikan.

B. KAJIAN TEORI**1. Etika dalam Konteks Pendidikan**

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Ini mencakup prinsip-prinsip moral yang memandu tindakan individu dan keputusan kelompok, serta standar perilaku yang diterima secara sosial (Bertens, 2007). Etika juga menyelidiki pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai nilai, kewajiban, dan keadilan, serta memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan dan karakter moral seseorang (Magnis-Suseno, 1991).

Etika dalam pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan dalam proses pendidikan. Etika tidak hanya menyangkut hubungan antara pendidik dan peserta didik, tetapi juga mencakup pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan (Campbell, 2003). Selanjutnya Menurut Sukur et al. (2022), etika pendidikan mencakup norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, guru, dan pengelola sekolah. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam implementasinya, etika pendidikan harus menjunjung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Etika menjadi penting dalam proses perubahan kurikulum karena kebijakan yang diambil akan berdampak langsung pada peserta didik, pendidik, dan masyarakat luas.

Strike dan Soltis (2009) menekankan pentingnya etika profesional dalam dunia pendidikan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pendidikan. Mereka menyebut bahwa setiap perubahan dalam sistem pendidikan harus mempertimbangkan aspek moral dan dampaknya terhadap kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ratnawati et al. (2025) menekankan bahwa pendidikan yang baik harus mampu mengakomodasi keragaman dan menciptakan inklusi. Oleh karena itu, pengelola pendidikan perlu menerapkan prinsip-prinsip

etika dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, etika pendidikan merupakan fondasi penting dalam menilai kebijakan pergantian kurikulum.

2. Pergantian Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga merupakan salah satu komponen vital dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Menurut Mulyono et al. (2023), kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, menurut Tyler (1949), kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang dirancang dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Hal ini menekankan bahwa kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga pengalaman belajar yang mendukung pengembangan peserta didik secara menyeluruh.

Pergantian kurikulum adalah proses perubahan sistematis terhadap isi, pendekatan, dan struktur kurikulum guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan negara. Menurut Ornstein dan Hunkins (2017), kurikulum merupakan refleksi dari filosofi pendidikan yang berkembang dalam suatu negara dan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sering kali bersifat politis dan strategis.

Snyder, Bolin, dan Zumwalt (1992) menjelaskan bahwa perubahan kurikulum dapat bersifat substantif atau simbolik. Substantif ketika perubahan benar-benar dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan simbolik ketika hanya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Dalam konteks Indonesia, pergantian kurikulum sering kali terjadi dalam periode yang singkat, seperti dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kemudian ke Kurikulum 2013 (K-13), dan saat ini ke Kurikulum Merdeka.

Setiap perubahan ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sehingga proses ini perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pertimbangan etis agar tidak merugikan peserta didik dan satuan pendidikan, terutama yang berada di wilayah tertinggal.

3. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merujuk pada semua sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Menurut Sukur et al. (2022), pembiayaan pendidikan mencakup anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, biaya yang ditanggung oleh orang tua, serta kontribusi dari sektor swasta. Pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata (UNESCO, 2012). Dalam konteks perubahan kurikulum, pembiayaan menjadi salah satu aspek krusial karena setiap kebijakan baru biasanya menuntut investasi baru, seperti pelatihan guru, pengadaan buku ajar, pengembangan sistem penilaian, dan infrastruktur pendukung.

Menurut Nurdin (2018), pergantian kurikulum tanpa persiapan anggaran yang memadai dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan. Sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya terbatas akan kesulitan untuk mengimplementasikan kurikulum baru secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah. Dikutip melalui Data dari Ratnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa sekolah di daerah perkotaan sering kali mendapatkan lebih banyak dana dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

4. Etika dalam Pergantian Kurikulum dan Implikasinya terhadap Pembiayaan

Dilema etis muncul ketika kebijakan pergantian kurikulum tidak disertai dengan pertimbangan mengenai kesiapan satuan pendidikan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembiayaan. Tilaar (2009) mengkritisi pendekatan top-down dalam kebijakan pendidikan yang sering kali tidak mengakomodasi kondisi nyata di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan beban ganda bagi sekolah, guru, dan peserta didik.

Dalam kerangka keadilan distributif, kebijakan pendidikan harus menjamin bahwa semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Biesta (2010) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang etis harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi, keadilan, dan partisipasi. Oleh karena itu, keputusan untuk mengganti

kurikulum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi sumber daya dan kemampuan implementasi di setiap daerah.

5. Tantangan dan Peluang dalam Etika Pergantian Kurikulum

Tantangan utama dalam pergantian kurikulum adalah memastikan bahwa perubahan tidak menciptakan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan. Sahlberg (2011) menyebut bahwa banyak negara gagal dalam reformasi pendidikan karena mengabaikan faktor kesiapan implementasi, khususnya dalam hal pendanaan dan pelatihan. Menurut Ratnawati et al. (2025), perubahan kurikulum sering kali dihadapkan pada penolakan karena ketidakpahaman terhadap tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut. Selain itu, kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam menerapkan kurikulum baru juga menjadi kendala.

Namun, perubahan kurikulum juga menghadirkan peluang besar untuk perbaikan sistem pendidikan jika dilakukan secara bertahap, inklusif, dan berbasis bukti. Salah satu peluang tersebut adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif. Dengan adanya kurikulum baru, guru didorong untuk menggali metode pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Anita et al. (2025) yang menyatakan bahwa inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Fullan (2007) menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Jika dijalankan dengan prinsip etika dan manajemen pembiayaan yang baik, pergantian kurikulum dapat menjadi momen penting untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan nasional.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pergantian kurikulum dalam kaitannya dengan pembiayaan pendidikan dari perspektif etika kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika, kompleksitas, serta makna yang mendalam dari perubahan kurikulum yang terjadi akibat pergantian kepemimpinan, dan implikasinya terhadap sistem pembiayaan pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti menggali data dari berbagai sumber sekunder secara komprehensif melalui studi literatur dan analisis kebijakan.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi geografis tertentu, melainkan bersifat nasional dengan mengambil kasus-kasus pergantian kurikulum di Indonesia yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Subjek penelitian dalam konteks ini bukan individu, melainkan dokumen-dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, berita pendidikan, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu etika dalam pergantian kurikulum dan pembiayaannya. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan nasional yang berdampak pada sistem pendidikan dasar dan menengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang mencakup pengumpulan data dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional terakreditasi, regulasi pemerintah (undang-undang, peraturan menteri), dokumen kurikulum, laporan kebijakan, serta artikel media massa yang relevan. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui basis data daring seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan situs resmi pemerintah seperti Kemdikbud.go.id.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis kebijakan (policy analysis). Langkah-langkah analisis meliputi: (1) Reduksi data, yakni pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) Penyajian data secara tematik berdasarkan dimensi etika, dampak pembiayaan, serta strategi mitigasi; dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan utama dan interpretasi kritis terhadap kebijakan kurikulum dan implikasi finansialnya dalam sistem pendidikan nasional.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian kurikulum yang sering terjadi sebagai akibat dari pergantian pimpinan di kementerian pendidikan membawa dampak signifikan terhadap pembiayaan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap perubahan kurikulum umumnya memerlukan pengadaan buku baru, pelatihan guru, pembaruan infrastruktur, serta perubahan sistem evaluasi. Hal ini berdampak langsung pada anggaran pendidikan yang harus disesuaikan, bahkan seringkali membebani satuan pendidikan yang belum selesai beradaptasi dengan kurikulum sebelumnya.

Dari sisi etika, ditemukan bahwa pergantian kurikulum yang tidak melalui proses evaluasi yang menyeluruh dan partisipatif mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan kontinuitas kebijakan pendidikan. Kebijakan kurikulum yang berubah berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dapat mengabaikan kebutuhan jangka panjang peserta didik dan guru sebagai pelaksana utama pendidikan.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, perubahan kurikulum juga membawa peluang positif, seperti respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi abad 21. Oleh karena itu, strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak finansial dari pergantian kurikulum adalah dengan melakukan evaluasi berbasis data, uji coba terbatas sebelum implementasi nasional, serta perencanaan anggaran multiyears yang transparan dan inklusif.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pergantian kurikulum yang didorong oleh pergantian pimpinan memiliki konsekuensi finansial yang tidak kecil bagi sistem pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang dan analisis kebijakan yang berkelanjutan, dampak dari kebijakan tersebut dapat melemahkan efektivitas pembelajaran dan membebani lembaga pendidikan secara ekonomi. Dari sisi etika, penting adanya konsistensi, keberlanjutan, dan partisipasi publik dalam setiap proses perubahan kurikulum.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya pemerintah menetapkan standar etika dalam proses perubahan kurikulum, termasuk mekanisme partisipasi stakeholder pendidikan, evaluasi yang objektif dan transparan, serta penyusunan rencana pembiayaan yang matang dan inklusif. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur agar perubahan kurikulum tidak semata-mata mengikuti perubahan politik, melainkan berorientasi pada kepentingan jangka panjang peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
- Campbell, E. (2003). *The ethical teacher*. Open University Press.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.

- Nurdin, E. S. (2018). Educational policy making and the impact on student achievement: A literature review. *International Education Studies*, 11(4), 92-100. <https://doi.org/10.5539/ies.v11n4p92>
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2017). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (7th ed.). Pearson.
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Snyder, J., Bolin, F., & Zumwalt, K. (1992). Curriculum implementation. In P. W. Jackson (Ed.), *Handbook of research on curriculum* (pp. 402–435). Macmillan.
- Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2009). *The ethics of teaching* (5th ed.). Teachers College Press.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Peran strategis pendidikan dalam pembangunan nasional*. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2012). *Education for all global monitoring report: Youth and skills: Putting education to work*. Paris: UNESCO Publishing.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (1991). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Sukur, P., Rudinah, M. N. I., & Mulawarman, W. G. (2022). Manajemen Pembiayaan Sekolah Yayasan yang Dinaungi Perusahaan Evaluasi Model CIPP. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(2), 161-168.
- Ratnawati, E., Rachim, A., Mulawarman, W. G., & Warman, W. (2025). ANALISIS MAKRO PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMPN 1 ANGGANA. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 668-679.
- Mulyono, M., Komariyah, L., & Mulawarman, W. G. (2023). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 183-194.
- Anita, A., Wulandari, Y., Puspitasari, N. L. G. D., Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Analisis Literatur: Tantangan dan Peluang Public-Private Partnership (PPP) dalam

Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kalimantan Timur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 926-936